



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIO BIMO NANDITO A
2. Jabatan : MENTERI
3. NHK : 899361

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **187.595.355.600**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/249 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3623 m2/3838 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 114.193.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 488 m2/236 m2 di KAB / KOTA KOTA ---, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 346.65 m2/346.65 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 17.350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 382.13 m2/382.13 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.052.355.600

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **7.671.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 4VRZ Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5G Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp. 900.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2022, LAINNYA Rp. 800.000.000



4. KAPAL LAUT/PERAHU, VOLVO VENTA, 2 X 325 PK Tahun 2003,
HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA ZENIX 2.0 Q HV Tahun 2023,
HASIL SENDIRI Rp. 641.000.000
6. MOBIL, TOYOTA LC 300 VX-R 4X4 AT Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 2.350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.607.193.070
D. SURAT BERHARGA	Rp.	89.342.924.072
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.376.100.851
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	305.592.573.593
III. HUTANG	Rp.	13.388.722.164
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	292.203.851.429

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.